

Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Sudah Sesuai Aturan

PANGKALAN BUN-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengambil langkah strategis dan cepat dalam penanganan bencana Covid-19 di Bumi Tambun Bungai ini. Berpegang pada Keppres, Permendagri, dan Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, pemprov telah melakukan realokasi anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 ini sesuai aturan yang berlaku. Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menyebut, berkaitan dengan realokasi anggaran penanganan Covid-19, yang dilakukan pemprov sudah sesuai aturan. Gubernur mempersilakan pihak legislatif di tingkat provinsi bila ingin melakukan pengawasan.

Orang nomor satu di Kalteng ini juga menegaskan, perihal persoalan ini, pihaknya sudah menghubungi salah satu anggota DPRD provinsi. Apabila nanti DPRD mengundang pemprov untuk membahas mengenai anggaran penanganan ini, kata gubernur, pihaknya akan datang dan siap mempertanggungjawabkan.

“Para kepala dinas tidak perlu hadir, biar Gubernur Kalteng saja yang datang,” tegasnya didampingi anggota DPR RI Agustiari Sabran saat penyerahan paket sembako yang disalurkan melalui DPC PDIP Kobar di Pangkalan Bun, kemarin (28/4). “Kami pun sudah melarang para kepala perangkat daerah untuk menghadiri undangan DPRD Kalteng. Apabila ingin diskusi, silakan saja, tapi tidak perlu hadir di sana,” tambahnya. Apalagi, lanjutnya, dengan adanya kondisi seperti saat ini. Meski demikian, pihaknya tidak melarang bila diskusi dilakukan melalui video conference.

Gubernur kembali mengingatkan soal wabah Covid-19 yang sedang dihadapi Kalteng saat ini. Sangat perlu menerapkan *physical distancing*. Karena itu, menurut gubernur, tidak perlu harus datang ke kantor DPRD untuk melakukan pembahasan. “Kami minta DPRD Provinsi bisa mengerti, bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Silakan awasi sesuai dengan kewenangan,” ujar suami dari Yulistra Ivo Azhari ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hj Siti Nafsiah mengatakan, pihaknya sepakat atas usulan realokasi anggaran struktur APBD tahun 2020 senilai Rp689 miliar lebih, yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Akan tetapi, hingga saat ini pihaknya belum menerima rincian atas penggunaan anggaran penanganan Covid-19 ini. Sejauh ini data maupun laporan yang masuk ke pihaknya masih secara global. “Memang ada disampaikan data dan laporan secara global, tapi *floating* perinciannya belum,” ucap wakil rakyat dari dapil I Kalteng ini.

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Sudah Sesuai Aturan*, Rabu, 29 April 2020;
2. <https://nasional.kontan.co.id/>, *Apkasi: Realokasi APBD di setiap pemda sudah berjalan*, Selasa, 07 April 2020.

Catatan berita:

- Pasal 3 ayat (1) Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, Kepala Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- Pasal 3 ayat (3) Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD.

- Pasal 4 menyebutkan:
 - (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
 - (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
 - (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah